

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR BAGAN	xxiv
INTISARI.....	xxv
ABSTRACT.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	31
C. Tujuan Penelitian	32
D. Manfaat Penelitian.....	32
E. Keaslian Penelitian	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	45
A. Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.....	45
1. Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dalam Instrumen Hukum Nasional Indonesia	45
2. Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dalam Instrumen Hukum Pidana Internasional (<i>Mutual Legal Assistance/MLA</i>).....	56
B. Tindak Pidana Korupsi.....	67
1. Tindak Pidana Korupsi dalam Instrumen Hukum Nasional Indonesia	67

2. Korupsi dalam Instrumen Hukum Pidana Internasional....	69
C. Landasan Teori.....	75
1. Teori Kedaulatan	76
2. Teori Koordinasi.....	84
3. Teori <i>Aut Dedere Aut Judicare/Au Prosequi Au Dedere...</i>	87
BAB III METODE PENELITIAN	91
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	91
B. Definisi Operasional Variabel.....	105
C. Sumber Data	106
D. Lokasi dan Obyek Penelitian	111
E. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	117
F. Jalannya Penelitian.....	124
G. Analisis Data.....	125
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	127
A. Mekanisme dan Lembaga yang Terkait dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik	127
1. Lembaga Penegak Hukum yang Terkait dengan Bantuan Timbal Balik	130
a. Kepolisian.....	138
b. Kejaksaan	163
c. Komisi Pemberantasan Korupsi	179
d. Kementerian Luar Negeri.....	206
e. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	207
1) Direktorat Imigrasi	207
2) Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat (<i>Central Authority</i>).....	234
2. Proses Permintaan Bantuan Timbal Balik dari Indonesia (Negara Peminta) ke Negara Asing (Negara Diminta).....	255
a. Nunun Nurbaetie Daradjatun.....	271
b. Muhammad Nazaruddin	290

c. Sherny Kojongian	305
d. Anggoro Widjojo	331
B. Kendala-Kendala Permintaan Bantuan Timbal Balik	349
1. Koordinasi antar Lembaga dalam Bantuan Timbal Balik..	353
a. Prosedur dan Tata Cara.....	359
b. Bentuk Komunikasi antar Lembaga.....	368
c. Efisiensi dan Efektivitas Bantuan Timbal Balik	372
d. Anggaran Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik.....	379
2. Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Tindak Pidana Korupsi.....	382
3. Status Kewarganegaraan Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	388
C. Pengaturan ke Depan mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Tindak Pidana Korupsi.....	389
1. Pembinaan Aparat Penegak Hukum.....	395
2. Kerjasama Lembaga Penegak Hukum.....	399
3. <i>Central Authority</i> di Indonesia dan Kerjasama antar <i>Central Authority</i>	404
a. <i>Central Authority</i> di Indonesia	404
b. Kerjasama antar <i>Central Authority</i>	407
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	414
A. Kesimpulan	414
B. Saran.....	416
DAFTAR PUSTAKA	417
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	435